

Arsitektur Enterprise Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Domain Layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

Enterprise Architecture of Electronic Based Government System (SPBE) in Service in the Regional Government of Purwakarta Regency

1st Firyal Muthia Nadhifah
Fakultas Rekayasa Industri
Universitas Telkom
Bandung, Indonesia
firyalmn@student.telkomuniversit
y.ac.id

2nd Ari Fajar Santoso
Fakultas Rekayasa Industri
Universitas Telkom
Bandung, Indonesia
arifajar@telkomuniversity.ac.id

3rd Falahah
Fakultas Rekayasa Industri
Universitas Telkom
Bandung, Indonesia
falahah@telkomuniversity.ac.id

Abstrak—Saat ini Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah berkembang dengan cukup pesat sehingga tidak menutup kemungkinan untuk setiap organisasi membutuhkan teknologi informasi sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan atau organisasi. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam penerapan teknologi informasi adalah keselarasan antara bisnis yang dijalankan perusahaan atau organisasi serta kebutuhannya dengan teknologi yang digunakan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal perlu melakukan standarisasi dengan mengikuti Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 untuk meningkatkan kematangan teknologi informasi yang salah satunya pada bidang pemerintahan. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah menerapkan SPBE untuk mendukung visi, misi, dan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat kematangan atau nilai indeks SPBE di Kabupaten Purwakarta masih berada pada kategori baik. Oleh karena itu masih relevan untuk dilakukan perancangan *Enterprise Architecture* pada domain Layanan dengan menggunakan framework TOGAF. Fase yang digunakan pada TOGAF ADM meliputi *Preliminary Phase* dan *Architecture Vision* yang akan didukung oleh arsitektur SPBE khususnya pada domain layanan. Penulis memberikan solusi untuk melakukan perancangan model arsitektur layanan yang mampu mengoptimalkan pelayanan internal birokrasi

dan publik melalui sistem informasi dan teknologi yang digunakan.

Kata Kunci — TIK, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), *enterprise architecture*, TOGAF ADM, domain layanan

Abstract—Currently Information and Communication Technology (ICT) has developed quite rapidly so it is possible for every organization to need information technology as a tool to achieve a company or organization's goals. The main factor that must be considered in the application of information technology is the alignment between the business run by the company or organization and its needs with the technology used. By optimally utilizing technological advances, it is necessary to standardize by following Presidential Regulation No. 95 of 2018 to increase the maturity of information technology, one of which is in the government sector. The Regional Government of Purwakarta Regency has implemented SPBE to support the vision, mission, and programs that have been set previously. The maturity level or SPBE index value in Purwakarta Regency is still in the good category. Therefore, it is still relevant to design Enterprise Architecture in the Service domain using the TOGAF framework. The phases used in TOGAF ADM include the Preliminary Phase and Architecture Vision which will be supported by the SPBE architecture, especially in the service domain. The author provides a solution to

design a service architecture model that is able to optimize the internal services of the bureaucracy and the public through the information systems and technology used.

Keywords — ICT, *Electronic-Based Government System (SPBE)*, *enterprise architecture*, *TOGAF ADM*, *service domain*.

I. PENDAHULUAN

Pada era saat ini teknologi sudah berkembang dengan cukup pesat sehingga tidak menutup kemungkinan untuk setiap organisasi membutuhkan teknologi informasi sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan atau organisasi. Dalam pencapaian tujuan itu kebutuhan informasi dapat dicari melalui proses bisnis yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau organisasi sehingga akan muncul rencana teknologi informasi apa saja yang bisa memenuhi kebutuhan bisnis [1]. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam penerapan teknologi informasi adalah keselarasan antara bisnis yang dijalankan perusahaan atau organisasi serta kebutuhannya dengan teknologi yang digunakan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong seluruh pemerintah dunia untuk berkompetisi menjadi yang terbaik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik [2]. Berdasarkan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018, berbagai Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah menerapkan SPBE serta mendapatkan hasil yang mampu membantu pemerintah untuk menjalankan tugasnya [3]. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan serta pelayanan yang terbaik untuk meningkatkan keselarasan dan efisiensi sistem pemerintahan maka diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Selain Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat panduan dalam melakukan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dikeluarkan oleh Kemen PAN-RB yaitu Peraturan Menteri PAN-RB No. 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik [2]. DISKOMINFO Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu instansi pemerintahan yang sedang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. DISKOMINFO Kabupaten Purwakarta memiliki tujuan menjadi instansi yang berkualitas dalam menyelenggarakan komunikasi dan informatika terbaik dan modern untuk mendukung purwakarta [4]. Saat ini Pemerintahan Kabupaten Purwakarta memiliki beberapa permasalahan terutama pada domain layanan yang merupakan bagian dari arsitektur SPBE. Permasalahan utama pada domain layanan adalah berkaitan dengan pemeliharaan sistem yang masih bergantung pada pihak ketiga

dimana apabila pihak ketiga sulit untuk dikomunikasikan maka OPD akan kesulitan untuk memperbaharui konten atau memperbaiki konten serta menghadapi jika ada serangan dari *hacker* yang menyerang aplikasi yang digunakan. Dilihat dari permasalahan tersebut dibutuhkan solusi yang mampu menyelaraskan antara bisnis dan teknologi informasi dengan melakukan perancangan *enterprise architecture*. Pada perancangan ini dilakukan menggunakan *The Open Group Architecture Framework (TOGAF)*. TOGAF memberikan metode yang kompleks mengenai bagaimana cara membangun, mengelola dan meimplementasikan arsitektur enterprise yang bisa disebut dengan *Architecture Development Method (ADM)*. TOGAF ADM terdiri dari, *Preliminary Phase, Architecture Vision, Business Architecture, Information System Architecture, Technology Architecture, Opportunities & Solutions, Migration Planning, Implementation Governance, Architecture Change Management* [5].

II. KAJIAN TEORI

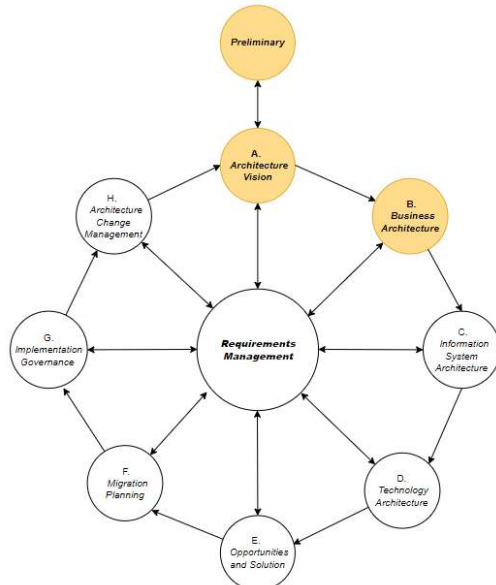
A. Enterprise Architecture

Enterprise Architecture merupakan sebuah proses analisis dan perancangan penetapan *roadmap* dalam mencapai misi dari sebuah organisasi atau perusahaan dengan mengoptimalkan proses bisnis dengan melibatkan Teknologi Informasi [6]. Menurut definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Enterprise Architecture* adalah sebuah perancangan proses bisnis dan teknologi dari setiap perusahaan maupun organisasi yang kemudian diintegrasikan dalam mencapai tujuan tertentu [7]. *Enterprise Architecture* berperan penting dalam menciptakan sebuah integrasi perusahaan maupun organisasi dan difokuskan pada infrastruktur yang terdiri dari *hardware, software, dan network* untuk saling bekerja sama dengan sasaran dan tujuan organisasi dalam menjalankan proses bisnis yang didukung oleh Teknologi Informasi [7].

B. TOGAF ADM

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) merupakan sebuah *framework* yang digunakan untuk mengembangkan *enterprise architecture* di mana terdapat metode dan *tools* yang detail dalam pengimplementasiannya. TOGAF memberikan metode yang kompleks mengenai bagaimana cara membangun, mengelola dan meimplementasikan arsitektur enterprise yang bisa disebut dengan *Architecture Development Method (ADM)*. ADM merupakan metode generik yang berisikan sekumpulan aktivitas yang

digunakan dalam memodelkan pengembangan arsitektur enterprise. Metode ini juga bisa digunakan sebagai panduan atau alat untuk merencanakan, merancang, mengembangkan dan mengimplementasikan arsitektur sistem informasi untuk organisasi [8]. Untuk melakukan perancangan enterprise architecture, TOGAF ADM memiliki beberapa fase yang dapat diimplementasikan. Fase-fase tersebut, sebagai berikut :



GAMBAR 1
FASE TOGAF

C. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sebuah pemanfaatan Teknologi Informasi yang diterapkan di sistem pemerintahan dalam bentuk penyelenggaraan serta peningkatan pelayanan untuk masyarakat [9]. Tujuan dari SPBE adalah untuk mewujudkan tata Kelola dari pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan public yang lebih berkualitas dan terpercaya. Dalam mendukung penerapan SPBE, pemerintahan telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE memiliki beberapa domain arsitektur yang mendiskripsikan substansi arsitektur memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain

arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, domain arsitektur layanan SPBE.

D. Domain Layanan

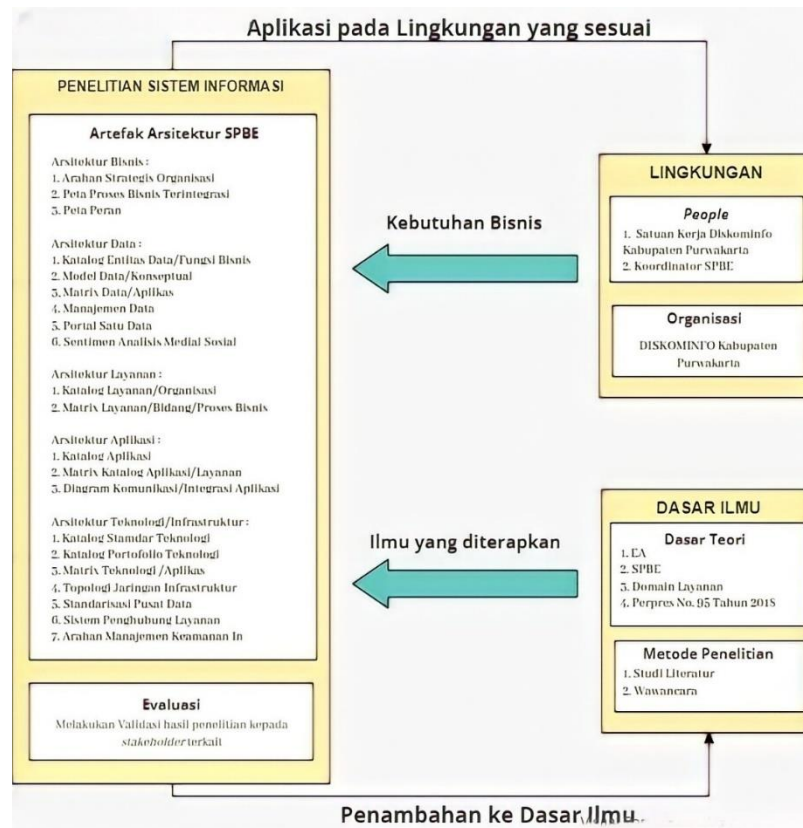
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomo 95 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdapat beberapa domain yang dapat membantu dalam penerapan SPBE. Domain proses bisnis saling berkaitan dengan disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan umum ataupun pengembangan aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi. Layanan SPBE terbagi menjadi dua yaitu layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Layanan administrasi merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Layanan Publik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di instansi pusat dan daerah.

E. Peta Proses Bisnis

Di dalam Perpres No.95 tahun 2018 pasal 1 peta rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah Langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Untuk lebih jelasnya dijelaskan di pasal 23 tentang proses bisnis ayat (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE ayat (2) Setiap Instansi Pusat menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan ayat (3) Setiap Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah [10].

III. METODE

Model Konseptual merupakan sebuah gambar atau model yang terdiri dari elemen-elemen dengan fungsi untuk mengidentifikasi data pada proses penelitian [11]. Dengan adanya model konseptual ini diharapkan dapat mendapatkan arahan yang jelas terkait bagian-bagian pada penelitian. Model konseptual dalam perancangan *Enterprise Architecture* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada domain layanan di Diskominfo Kabupaten Purwakarta dibagi menjadi 3 elemen yaitu lingkungan, penelitian sistem informasi, dan dasar ilmu



GAMBAR 2
MODEL KONSEPTUAL

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fase Preliminary

Tahap *Preliminary Phase* adalah tahapan untuk melakukan persiapan awal dari proses perancangan EA dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi dalam melakukan

rancangan arsitektur target. Pada tahap ini kegiatan yang bisa dilakukan adalah mengelola data dari sumber informasi dan dokumen yang didapatkan. Kemudian menyiapkan *framework*, menentukan *scope design* dan prinsip arsitektur. Artefak yang akan dihasilkan pada fase ini berupa *principle catalog*.

TABEL 1
PRINCIPLE CATALOG

Arsitektur	Prinsip	Deskripsi
Layanan	Sederhana	Merupakan standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
	Partisipatif	Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
	Akuntabel	Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
	Berkelanjutan	Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
	Transparansi	Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
	Keadilan	Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

B. Fase Architecture Vision

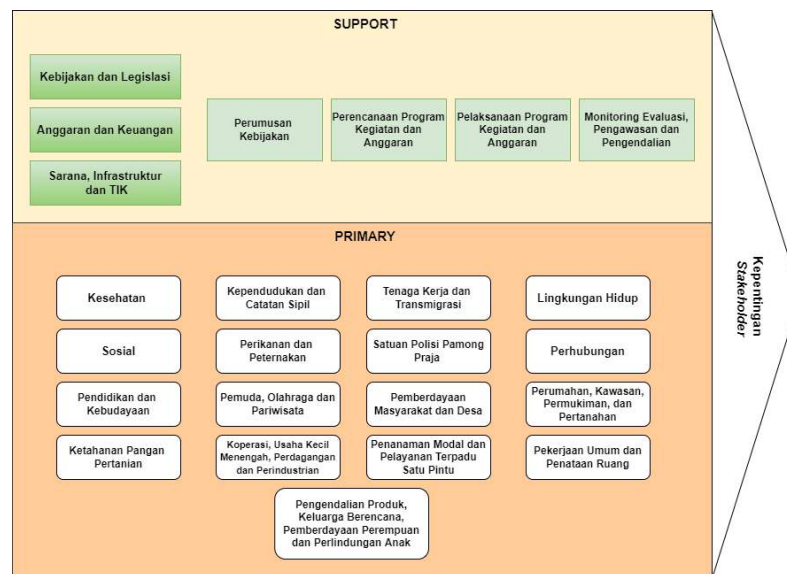
Architecture Vision merupakan tahapan pertama pada TOGAF ADM. Tujuan dari tahapan ini untuk mendeskripsikan terkait fase

awal dalam alur pengembangan arsitektur yang mencakup informasi terkait pendefinisian ruang lingkup inisiatif pada pengembangan arsitektur, pengidentifikasian *stakeholder*, membuat visi

arsitektur dan memperoleh persetujuan untuk melanjutkan pengembangan arsitektur.

TABEL 2.
STAKEHOLDER PEMDA KAB. PURWAKARTA

No	Stakeholder	Role
1.	Bupati	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPBE di Diskominfo Kabupaten Purwakarta dan memimpin
2.	Sekretaris Daerah	Mengkoordinasikan penerapan kebijakan SPBE. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Instansi pusat dan Pemda lain.
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bertanggung jawab perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan terkait kebijakan, program, dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. Serta, mengelola terkait arsitektur SPBE.
4.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Mengkoordinasikan integrasi proses bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
5.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA)	Bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, serta urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan.
6.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)	Mengkoordinasikan penganggaran SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta



GAMBAR 3
VALUE CHAIN DIAGRAM

C. Arsitektur Layanan

Arsitektur Layanan merupakan *output* yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE yang bermanfaat. Layanan SPBE terbagi menjadi dua yaitu Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

a. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang akan mendukung tata laksana birokrasi dalam

rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di instansi pusat dan Pemkab Purwakarta. Layanan ini ditetapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum. Terdapat layanan yang mendukung kegiatan di bidang-bidang tertentu seperti kepegawaian, Pendidikan, Keuangan, *E-office*, *Business Intelligent* Bupati, Perencanaan, Informasi Retribusi Bapenda, Monev, Pengadaan Barang dan jasa, Informasi Sismasja Binamarga, Informasi daerah database irigasi, Pengawasan, Kesehatan, Informasi, Pemantauan hasil pilkades

b. Layanan Publik berbasis elektronik

Layanan ini merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di instansi pusat dan Pemkab Purwakarta.

1. *Service Architecture Requirement*

Service Architecture Requirement berisikan kebutuhan layanan pada saat melakukan perancangan arsitektur layanan yang selaras dengan indikator evaluasi SPBE. Berikut merupakan kebutuhan layanan pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Tabel 3 dibawah ini :

TABEL 3
SERVICE ARCHITECTURE REQUIREMENT

No	Requirement
1	Layanan mampu memberikan percepatan alur birokrasi terhadap pelayanan berbasis masyarakat
2	Mempunyai sistem layanan terpadu satu pintu untuk mempermudah dan mempercepat alur pelayanan tingkat daerah
3	Layanan mampu mencakup seluruh proses bisnis dan aplikasi pada program prioritas
4	Menerapkan prinsip-prinsip layanan pada setiap aktivitas

2. Matriks Layanan Proses Bisnis

Matriks layanan/proses bisnis menggambarkan interaksi dan informasi antara bidang dan proses bisnis level 0 yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Matriks layanan/proses bisnis membutuhkan proses bisnis level 0 kemudian digabungkan dengan bidang pada layanan administrasi pemerintahan dan public berbasis elektronik sehingga mampu menghasilkan layanan SPBE. Serta dibutuhkan penyalarsan dengan aplikasi dan layanan yang telah dipetakan pada katalog layanan/organisasi

TABEL 4
DESKRIPSI PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

Kode Proses	Nama Proses	Tipe Proses
KabPwk 1	Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan	Utama
KabPwk 2	Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	Utama
KabPwk 3	Peningkatan kualitas hidup masyarakat	Utama
KabPwk 4	Peningkatan kemandirian ekonomi	Utama

	dan kesejahteraan masyarakat	
KabPwk 5	Pelayanan administrasi dan kearsipan	Pendukung
KabPwk 6	Pelayanan Informasi, Komunikasi, Statistik, Keamanan informasi dan Aplikasi Informatika	Pendukung
KabPwk 7	Pembentukan perundang-undangan dan pelayanan hukum	Pendukung
KabPwk 8	Perencanaan pembangunan daerah	Manajerial
KabPwk 9	Pengelolaan SDM	Manajerial
KabPwk 10	Pengendalian dan pengawasan	Manajerial
KabPwk 11	Pengelolaan pemerintahan dan organisasi	Manajerial
KabPwk 12	Pengelolaan keuangan dan aset daerah	Manajerial

a. 4.3.2.1 Matriks Layanan Proses Bisnis Administrasi

Matriks ini menggambarkan layanan apa saja yang disediakan agar dapat digunakan oleh bidang-bidang tertentu dan untuk mendukung proses bisnis yang ada. Berikut matriks layanan proses bisnis administrasi disajikan pada tabel 5:

TABEL 5
MATRIKS LAYANAN ADMINISTRASI

Bidang/Proses Bisnis	Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik
Kepegawaian	- Layanan Kepegawaian - Layanan Pembelajaran Online ASN
Pendidikan	- Layanan Pendidikan - Layanan Pendidikan Informasi Data ASN - Layanan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan - Layanan Pengembangan Keprofesian
Keuangan	- Layanan Pengelola Keuangan - Layanan Pengelola Pendapatan
e-office	- Layanan Kendali Urusan
Business Intelligent Bupati	- Layanan Business Intelligent Bupati
Pengelolaan Data	- Layanan Data Statistik
Monev	- Layanan Monitoring & Evaluasi - Layanan Informasi Pembangunan
Perencanaan	- Layanan Perencanaan Daerah
Pengaduan	- Layanan <i>Whistle Blowing System (WBS)</i>
Informasi	- Layanan Informasi - Layanan Informasi Retribusi Bapenda - Layanan Informasi Binamarga
Diklat	- Layanan Diklat
Pemantauan	- Layanan Pemantauan Hasil Pilkadaes

b. Matriks Layanan Proses Bisnis Publik

Matriks ini menggambarkan keterkaitan atau interaksi antara bidang pada layanan publik dengan proses bisnis utama level 0. Sehingga

dapat dihasilkan layanan yang sesuai untuk mendukung proses bisnis utama level 0 dalam rangka meningkatkan suatu pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta

TABEL 6
MATRIKS LAYANAN PROSES BISNIS PUBLIK

[illegible]

3. GAP Analysis

GAP Analysis digunakan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi kebutuhan target dari Kabupaten Purwakarta sebagai bahan pengembangan selanjutnya. Hasil analisis ini

memberikan solusi untuk kesenjangan kebutuhan yang ditargetkan sudah terpenuhi ataupun belum terpenuhi.

Requirement	Fulfillment			Keterangan	Solusi
	N	P	F		
Layanan mampu memberikan percepatan alur birokrasi terhadap pelayanan berbasis masyarakat			V	102 Aplikasi yang dibangun oleh pemkab purwakarta sd tahun 2022 cukup memberikan manfaat untuk melakukan proses DILAN (Digital Melayani) di Purwakarta	-
Mempunyai sistem layanan terpadu satu pintu untuk mempermudah dan mempercepat alur pelayanan tingkat daerah		V		Ekosistem digital untuk pelayanan terpadu satu pintu	Perbaikan aplikasi dan pengembangan ekosistem pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah pelayanan masyarakat
Layanan mampu mencakup seluruh proses bisnis dan aplikasi pada program prioritas		V		aplikasi layanan masih belum semua Perangkat daerah membuatnya, dan layanan perangkat daerah masih bersifat website	Memberikan usulan perbaikan pemetaan layanan sehingga dapat mencakup seluruh perangkat daerah dan layanan publik pada program prioritas
Menerapkan prinsip-prinsip layanan pada setiap aktivitas		V		Pemkab Purwakarta belum sepenuhnya menerapkan prinsip layanan yang baik	Memiliki layanan yang dapat membentuk mengembangkan prinsip layanan yang ada di Pemkab. Purwakarta

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam melakukan perancangan Arsitektur *Enterprise SPBE* pada Domain Layanan di Kabupaten Purwakarta dapat disimpulkan bahwa, Penelitian ini menghasilkan rancangan EA SPBE pada domain layanan di Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan pendekatan TOGAF ADM dan Arsitektur SPBE yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Dalam perancangan ini diawali dengan *Preliminary Phase, Architecture Vision*, dan Arsitektur Layanan sehingga menghasilkan model arsitektur EA pada domain layanan. *Output* dari rancangan ini adalah berupa katalog serta matriks.

Layanan yang telah didefinisikan adalah Layanan yang sudah disesuaikan dengan proses bisnis level 0 dan juga disesuaikan dengan aplikasi umum dan aplikasi khusus. Layanan pada Kabupaten Purwakarta dibagi menjadi dua yaitu Layanan Administrasi pemerintahan dan Layanan publik sehingga dapat dideskripsikan jenis layanan yang akan menjadi targeting berupa perbaikan aplikasi dan pengembangan ekosistem pelayanan masyarakat, perbaikan layanan yang dapat mencakup seluruh perangkat daerah dan layanan publik pada program prioritas sau pintu.

REFERENSI

- [1] Sayono, G. K. (2018). Perancangan Architecture Enterprise Menggunakan Kerangka The Open Group Architecture Framework (TOGAF) (Studi Kasus: PT Pos Indonesia Malang).
- [2] Haryono, W. F. (2019). Analisis dan Perancangan Enterprise Architecture Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan Kerangka Kerja TOGAF ADM Pada Fungsi Keuangan dan Promosi (Studi Kasus: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bandunf Barat).
- [3] Assa'Diyah, K. H. (2021). *Perancangan Arsitektur Enterprise Untuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Domain Aplikasi Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi*.
- [4] DISKOMINFO. (n.d.). Retrieved from DISKOMINFO:
- [5] Indriani, R., Murahartawaty, & Hanafi, R. (2016). Analisis dan Perancangan Technology Architecture Menggunakan The Open Group Architecture Framework Architecture Development Method (TOGAF ADM) Pada PT Shafco Multi Trading.
- [6] Handika, D. Y., Mulyana, R., & N. A. (n.d.). Analisis Arsitektur Enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan Kerangka Kerja TOGAF

- ADM (Studi Kasus: Disparbud Kabupaten Bandung Barat)
- [7] Monita, K., Erfina, A., & Warman, C. (2021). *Perancangan Enterprise Architecture Menggunakan Framework TOGAF Architecture Development Method (TOGAF-ADM) Pada SMK Bina Mandiri 2.*
 - [8] Yunis, R., & Surendro, K. (2009). *Model Enterprise Architecture untuk Perguruan Tinggi di Indonesia.*
 - [9] Taqiya, N. A., Mukromah, S., & Pratama, A. (2020). *Analisis Tingkat Kematangan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur.*
 - [10] Indonesia, K. S. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia.
 - [11] Putri, V. D., Surya Gumilang, S. F., & Nugraha, R. A. (n.d.). *Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Domain Aplikasi di Lingkungan Daerah Kabupaten Kuningan.*